



Meruntuhkan Budaya Kuasa dan Kekerasan pada Anak: Belajar dari Ki Hadjar Dewantara

Mohammad Andi Hakim

Universitas Diponegoro

Abstract

This research investigates the cultural power and violence to children in education and parenting activity. The theory of education developed by Ki Hadjar Dewantara is used to analyze the problem of the research. The data of this research were taken from the Ki Hajar's book and the violence contemporary condition that flourish to children. The steps in analyzing the data were first: taking literatures about violence and Ki Hadjar's theory, second: reading the texts in the book, third: identifying the cultural violence to children in their life, and fourth, formulating a concept model on education which friendly for children. The results of the analysis show that some thoughts of Ki Hadjar can be implemented to solve the cultural power and violence on the education and parenting activity. By applying Pancadharmas, *Trisaksi Jiwa*, *Tri Nga*, *Leadership Trilogy* and *Among* pattern can give the better life for children.

Keywords: Violence, Culture, Parenting, Education

Abstrak

Penelitian ini mengkaji budaya kuasa dan kekerasan pada anak dalam pendidikan dan pola pengasuhan orang tua. Pemikiran, ajaran, fatwa dan falsafah pendidikan yang dikembangkan oleh Ki Hadjar Dewantara menjadi teori yang digunakan untuk membedah permasalahan dalam penelitian. Data penelitian berasal dari uraian buku pemikiran Ki Hadjar dan keadaan kontemporer kekerasan yang marak terjadi pada anak. Tahapan dalam analisis data yang dilakukan diantaranya studi literatur tentang budaya kekerasan dan pemikiran pendidikan Ki Hadjar, membaca teks dalam buku yang dikaji, mengidentifikasi budaya kekerasan pada anak dalam kehidupannya, dan memformulasikan konsep model untuk pendidikan ramah anak. Hasil telaah yang dilakukan menunjukkan bahwa pemikiran-pemikiran Ki Hadjar Dewantara dapat diimplementasikan untuk meruntuhkan budaya kuasa dan kekerasan pada anak dalam pendidikan dan pola pengasuhannya. Dengan menerapkan ajaran dan fatwa, Pancadharmas, *Trisaksi Jiwa*, *Tri Nga*, *Trilogi Kepemimpinan* dan pola *among* dapat menjadikan kehidupan anak menjadi lebih baik.

Kata kunci: Kekerasan, Budaya, Pola Asuh & Pendidikan

Coressponding author

Email: andyhachim@gmail.com

Pendahuluan

Kekerasan selalu erat kaitannya dengan peristiwa yang mengerikan, menakutkan, menyakitkan dan bahkan mematikan. Tindak kekerasan selalu mewarnai segala sendi kehidupan manusia dalam berbagai bidang seperti sosial, politik, ekonomi, budaya dan bahkan sampai pada aspek pendidikan. Fenomena kekerasan tersebut seakan memiliki hak paten dan meneguhkan diri untuk berkembang berdampingan bersama manusia. Salah satu tindak kekerasan yang meresahkan adalah kekerasan yang terjadi pada lembaga pendidikan. Pendidikan yang hakikatnya didesain untuk membentuk manusia yang berbudi luhur dan humanis, kini menjadi ladang subur untuk memproduksi bibit manusia yang mengindahkan kekerasan. Indonesia pun tidak lepas dari krisis ramahnya pendidikan bagi remaja. Kasus-kasus tindak kekerasan dalam pendidikan masih mengemuka dan tak kunjung usai, misalnya tawuran antar pelajar, kekerasan fisik yang dilakukan guru terhadap siswa, hingga kekerasan seksual. Bahkan fakta yang mencengangkan seperti diungkapkan oleh Mendikbud Anies Baswedan, bahwa 84% pelajar di Indonesia mengalami tindak kekerasan dalam pendidikan, baik sebagai korban maupun pelaku (*metrotvnews.com*).

Kekerasan pada anak salah satunya marak terjadi di sekolah. Meningkatnya kasus kekerasan tersebut dapat diamati dari hasil penelitian yang dilakukan oleh CPMH (Center for Public Mental Health) UGM menunjukkan bahwa kekerasan di sekolah kian meningkat. Hal tersebut dikuatkan oleh *Plan* Indonesia yang menyatakan bahwa 300 anak SD, SMP dan SMA di dua kecamatan di Bogor yaitu sebanyak 15,3 % siswa SD, 18% siswa SMP dan 16% siswa SMA mengaku menjadi korban tindak kekerasan di sekolah. Adapun pelaku kekerasan di sekolah dilakukan oleh guru sebanyak 14,7% dan sesama teman sebanyak 35,3 % (Kurniawan, 2011) dalam (Martono 2012, 2). Jika melongok pada kasus yang terjadi pada tahun 2011 lalu, sembilan murid di sebuah SD Negeri Kota Binjai dipukul dan dijepit hidungnya serta tangan dan kaki mereka dipukul dengan penggaris kayu oleh sang guru atas sebab tidak mampu menghafalkan 33 provinsi di Indonesia.

Selain jenis kekerasan tersebut, kekerasan simbolik yang tidak disadari sesungguhnya terjadi didunia pendidikan nasional, misalnya kebijakan kurikulum yang dipaksakan penerapannya disetiap daerah, sampai pada konten buku mata pelajaran yang mengajarkan tindak kekerasan. Baru-baru ini misalnya Buku berjudul “Anak Islam Suka Membaca” untuk siswa Taman Kanak-kanak (TK) mengarah pada upaya penanaman benih-benih kekerasan dalam beragama. Terdapat 32 kata dan rangkaian kata yang mengarah pada pendidikan kekerasan. Beberapa kata tersebut seperti “Selesai Raih, Bantai Kiai”, “Sahid di Medan Jihad”, “Basoka dibawa Lari”, “Bom”, “Bid’ah” dan lain sebagainya. Hal tersebut tentu mengerikan sebagai materi pelajaran yang diberikan pada anak-anak. Dampak jangka panjang yang ditimbulkan tentu lahirnya kesempitan cara berfikir dalam beragama, dan upaya pelanggaran keyakinan bahwa kekerasan begitu dianjurkan oleh agama.

Pada tahun 2014 lalu, muatan kekerasan juga ditemukan dalam buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekertikelas XI SMA yang diterbitkan oleh Kemdikbud, didalamnya menyebutkan secara eksplisit tentang ajaran kekerasan dalam beragama. Misalnya pada kalimat “*orang yang menyembah selain Allah Swt. telah menjadi musyrik dan boleh dibunuh*” dan “*Menyebut nama nabi, syekh, atau malaikat sebagai perantara dalam doa juga merupakan syirik*”. Hal tersebut tentu berbahaya bagi konstruksi nalar dan fikir peserta didik untuk menjadi pribadi yang mendambakan *habitus* toleransi, menghargai keberagaman dalam keberagaman dan mencintai khazanah budaya bangsa (*unity in diversity*).

Kekerasan sepertinya sukar untuk dilepaskan didunia pendidikan nasional. Alih-alih menciptakan generasi bangsa yang berkualitas, namun justru proses yang dilalui jauh dari kata ramah. Parahnya lagi, peserta didik adalah kaum remaja usia produktif yang diharapkan mampu meneruskan cita-cita kemerdekaan. Disisi lain, remaja justru menjadi objek dan subjek kekerasan yang terjadi dalam pendidikan.

Melihat berbagai permasalahan kekerasan terhadap anak tersebut, perlu adanya penanganan serius. Beberapa penelitian yang menggagas perbaikan kualitas pendidikan pada anak pernah dilakukan oleh Ayu Rahayu (2014) dengan tulisan berjudul *Penerapan Konsep Pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam Pembelajaran untuk Membentuk Peserta Didik Berkarakter Cerdas dan Berintegritas*. Penelitian tersebut berupaya mengungkapkan pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara dan relevansinya dengan pembentukan karakter peserta didik yang ideal. Selain itu, dua penelitian yang mengungkapkan fakta kekerasan dalam buku pendidikan, dilakukan oleh Hakim (2016) berjudul *Fight Against Legitimate Language Violence to Childern; The Study of Critical Discourse Analysis in the Book of Anak Islam Suka Membaca* dan *The Analysis of Symbolic Violence in Education; The Study of Critical Discourse Analysis in the Book of PAI dan Budi Pekerti*. Dua penelitian tersebut mengungkapkan praktik kekerasan simbolik pada anak melalui teks bahan ajar. Anak diarahkan menjadi pribadi yang bersahabat dengan kekerasan atas nama agama.

Dari beberapa penelitian diatas kiranya masih terbatas kajian yang mengarahkan dirinya pada pemikiran Ki Hadjar Dewantara sebagai *counter* melawan budaya kekerasan pada anak. Dalam tulisan ini penulis menguraikan ajaran dan fatwa Ki Hadjar Dewantara mengenai pendidikan dan perlakuan yang semestinya diberikan kepada anak. Selain juga mengungkap berbagai praktik kekerasan yang terjadi pada anak, khususnya dalam *domain* pendidikan. Pemikiran-pemikiran Ki Hadjar Dewantara menjadi dasar dalam memberikan pedoman dan panduan pola pengasuhan anak yang jauh dari kekerasan . Lebih dari itu, penelitian ini berupaya untuk memberikan pemahaman baru tentang konsep pendidikan agama *nir* kekerasan. Karena sejatinya melalui pendidikan kedamaian bisa diretas, melalui pendidikan ketentraman bisa tercipta, tentunya dengan pendidikan yang memanusiakan manusia.

Menguak Akar-Akar Kekerasan

Fenomena kekerasan dalam tulisan ini fokus pada peristiwa dan perlakuan yang diterima anak, baik dalam kehidupan pendidikan maupun sosialnya. Seakan tidak dapat dilepaskan dari pendidikan, kekerasan erat kaitannya dengan aktivitas penyelenggaraan pendidikan baik yang kasat mata maupun abstrak. Kekerasan dalam pendidikan dapat ditinjau dari tingkatan perilakunya. Assegaf (2004:37) dalam (Supraptio 2013, 78) merumuskan beberapa tipologi kekerasan dalam pendidikan menjadi tiga kelompok tingkatan, antara lain kekerasan tingkat ringan yang berupa potensi kekerasan (*violence as potential*), kekerasan tingkat sedang yang berupa kekerasan dalam pendidikan sendiri (*violence in education*), dan kekerasan berat yang berupa tindakan kriminal (*criminal action*).

Violence as potential dapat terungkap melalui tindakan maupun pernyataan seseorang kepada orang lain yang bersifat *bullying*. Kekerasan tingkat ringan biasanya dilakukan secara tertutup (*covert*), *defensive*, pelecehan martabat dan penekanan psikis. Kekerasan psikologis tersebut dapat memicu terjadinya tindakan-tindakan yang merugikan bagi korban, maupun lingkungannya. Sementara *violence in education* adalah kekerasan yang nampak terjadi dalam aktivitas pendidikan dan pembelajaran. Kekerasan tingkat sedang mengarah pada perilaku kekerasan fisik, pelanggaran aturan lembaga pendidikan dan dilakukan secara terbuka (*overt*). Sedangkan *criminal action* merupakan jenis kekerasan berat, karena pelaku sudah melakukan tindakan diluar batas toleransi dan dikategorisasikan sebagai perbuatan melanggar hukum. Kekerasan tersebut lazimnya mengarah pada kerugian fisik maupun psikis terhadap korban, misalnya pada kasus pelecehan seksual hingga pembunuhan. Kekerasan tingkat berat identik dengan perilaku *ofensif*, ditempuh melalui jalur hukum dan berada diluar lingkup sekolah

Fenomena kekerasan pada anal baik dalam keluarga, pendidikan maupun lingkungan sosialnya tersebut tentu tidak asing terngiang dalam pola pikir dan pengamatan kita. Selain klasifikasi diatas, (Supraptio 2013, 78) menguraikan beberapa bentuk kekerasan pada anak seperti kekerasan fisik yang mengarah pada perilaku mencederai, dan merupakan tindakan kekerasan yang berat. Selanjutnya adalah kekerasan psikis yang biasanya terjadi melalui tutur kata yang kasar, sinis, hingga penghinaan yang dapat menyebabkan anak merasa rendah diri dan pasif.

Kemudian kekerasan yang tidak kasat mata dan memiliki dampak yang signifikan adalah kekerasan simbolik. Seperti diungkapkan oleh (Martono 2012, 5) bahwa konsep kekerasan simbolik pada dasarnya digunakan untuk menjelaskan mekanisme yang digunakan kelompok elit atau kelompok kelas atas yang mendominasi struktur sosial untuk “memaksakan” ideologi, budaya, kebiasaan, atau gaya hidupnya kepada kelompok kelas bawah yang didominasinya. Penjelasan tersebut memaknai bahwa kekerasan simbolik secara mendasar sebagai salah satu tindak kekerasan pada anak yang dapat menjadi penghalang proses humanisasi dalam

kehidupannya. Misalnya dalam kegiatan pendidikan, peserta belajar sebatas menjadi objek dalam belajar dengan budaya kekerasan yang mengarah pada pengkeberian terhadap hakikat pemerolehan pengetahuan, yakni untuk memanusiaikan manusia.

Bourdieu membuat sintesis untuk menggambarkan kuasa atau kekerasan simbolik. Pandangannya bahwa bentuk simbolik memiliki kekuatan untuk menstrukturkan dan membentuk realitas. Selain itu bentuk-bentuk simbolik juga merupakan wilayah pertarungan, pergulatan dan dominasi karena setiap kelompok akan mendefinisikan kondisi sosial sesuai kepentingannya. Melalui bentuk simbolik pula kekuasaan dan dominasi difahami dengan keliru, serta diakui sebagai sesuatu yang absah, akibatnya hal tersebutlah yang membuatnya efektif (1995a: 166-8) dalam (Ainullah 2006, 105).

Relevansinya dengan pelaksanaan pendidikan pada anak, kekerasan simbolik terjadi dalam pelaksanaan aktivitas belajar mengajar pada lembaga pendidikan. Praktik kekerasan simbolik dapat mengemuka melalui segala macam aturan pendidikan yang menjadi budaya kelas dominan dan dipaksa untuk diterima oleh struktur sosial lembaga pendidikan yang majemuk. Peserta didik dikenalkan dengan budaya, kebiasaan, gaya hidup, selera, cara berpakaian, bersikap, cara berperilaku, cara bertutur kata, cara bertindak yang baik menurut kelas dominan. Lantas kemudian mereka menganggapnya sebagai sebuah hal yang biasa dan menerimanya dengan lapang, meski disisi lain harus kehilangan *habitus* asal mereka. (Supraptio, 2013:85).

Lebih dari itu kekerasan simbolik terjadi pula pada *content* kurikulum dan materi ajar yang digunakan. Buku-buku pelajaran disekolah acap kali condong memberikan contoh budaya kelas dominan saja. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Martono (2012) terhadap buku jenjang pendidikan dasar yang membuktikan adanya kesenjangan sosial antara kaya dan miskin dan penggunaan budaya kelas dominan yang massif. Selain itu dari penelitian Hakim (2016) terhadap Buku PAI dan Anak Islam Suka Membaca yang ternyata mendikte anak untuk menjadi agen *Jihad* yang mengindahkan kekerasan dengan perang dan membunuh sebagai bentuk pembelaanya terhadap agama.

Belajar dari Ki Hajar

Membahas tentang pola pendampingan dan pengasuhan anak tidak lepas dari pemikiran pokok Ki Hadjar Dewantara tentang pendidikan. Sistem pendidikan menurutnya dikembangkan berdasarkan lima asas pokok yang disebut Pancadharma Tamansiswa (Suratman 1985:,111) dalam (Rahayu 2014,71-72), yang meliputi:

Asas kemerdekaan, yang berarti disiplin diri sendiri atas dasar nilai hidup yang tinggi, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Merdeka adalah sanggup dan mampu untuk berdiri sendiri untuk mewujudkan hidup tertib dan damai dengan

kekuasaan atas diri sendiri. Merdeka tidak hanya berarti bebas tetapi harus diartikan sebagai kesanggupan dan kemampuan yaitu kekuatan dan kekuasaan untuk memerintah diri pribadi.

Asas kodrat alam, yang berarti bahwa pada hakikatnya manusia itu sebagai makhluk. Manusia tidak dapat lepas dari kodrat alam dan akan berbahagia apabila dapat menyatukan diri dengan kodrat alam yang sesuai dengan kemajuan zaman. Oleh karenanya setiap individu harus berkembang dengan sewajarnya.

Asas kebudayaan, yang berarti bahwa pendidikan harus membawa kebudayaan ke arah kemajuan dan kepentingan hidup rakyat pada setiap zaman dan keadaan. *Asas kebangsaan*, yang berarti tidak boleh bertentangan dengan kemanusiaan. Oleh karena itu asas kebangsaan ini tidak mengandung arti permusuhan dengan bangsa lain melainkan mengandung rasa satu dengan bangsa sendiri, satu dalam suka dan duka, rasa satu dalam kehendak menuju kepada kebahagiaan hidup lahir dan batin seluruh bangsa. *Asas kemanusiaan*, yang menyatakan bahwa darma setiap manusia itu adalah perwujudan kemanusiaan yang harus terlihat pada kesucian batin dan adanya rasa cinta kasih terhadap sesama manusia dan terhadap makhluk ciptaan Tuhan seluruhnya.

Ki Hadjar Dewantara menyebutkan pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin dan karakter), pikiran, dan tubuh anak. Bagian-bagian tersebut tidak boleh dipisahkan agar dapat memajukan kesempurnaan hidup anak (Ki B Boentarsono, dkk., 2004: 32). Pemikiran Ki Hadjar Dewantara mirip dengan pemikiran Bloom yang mengategorikan hasil belajar dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Aspek kognitif analog dengan pikiran, aspek afektif analog dengan budi pekerti, sedangkan aspek psikomotor analog dengan tubuh anak.

Pendidikan yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yaitu dengan sistem among (Ki Hadjar Dewantara, 2011: 13). Sistem among adalah sistem pendidikan yang berjiwa kekeluargaan dan bersendikan kodrat alam dan kemerdekaan. Keluarga mengandung arti bahwa Guru seharusnya mendidik dengan dasar kasih sayang kepada sesama manusia, saling menghormati dan menghargai perbedaan, tolong menolong, gotong royong, serta menjunjung persatuan. Selanjutnya, bersendikan kodrat alam dan kemerdekaan berarti bahwa Guru harus memberikan kebebasan bagi peserta didik sesuai kodratnya.

Pemikiran pendidikan Ki Hadjar Dewantara terkandung didalam ajaran-ajarannya, seperti diuraikan oleh (Rahayu 2014, 73). Ajaran ini antara lain (1) tri sentra pendidikan, yaitu lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. (2) trilogi kepemimpinan, yaitu ing ngarsasung tulodha, ing madya mangun karsa, dan tut wuri handayani (3) tri saksi jiwa, yaitu cipta, rasa, dan karsa. (4) tri nga, yaitu ngerti ngrasa nglakoni serta (5) tri Nyaitu niteni nirokke nambahi.

Orang tua, guru dan masyarakat sebagai agen dari upaya implementasi sistem among tidak dapat terlepas dari trilogi kepemimpinan ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani. Ing ngarsa sung tuladha berarti seorang guru berada di depan dengan memberi teladan atau contoh yang baik. Ing madya mangun karsa berarti bahwa guru ada di tengah dengan membangkitkan semangat, motivasi, dan inovasi di lingkungannya. Tut wuri handayani artinya guru berada di belakang dengan terus memberi pengaruh. Dengan demikian akan tercipta keselarasan penuh cinta kasih dalam pola pengasuhan dan pendidikan anak.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode *library research*. Seperti diungkapkan (Donald 2005, 137) bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk menggambarkan dan mengklarifikasi pengalaman manusia didalam kehidupannya. Peneliti dengan metode kualitatif menggunakan data sebagai argumentasi penguat didalam deskripsinya. Data yang diperoleh bersumber dari beragam buku yang menjelaskan ajaran dan fatwa serta pemikiran Ki Hadjar Dewantara, kaitanya dengan konsep pengasuhan anak yang *nir* kekerasan. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan studi dokumentasi. Hancock (2013) menggambarkan dokumentasi sebagai materi-materi tulisan yang luas dan menghasilkan informasi kualitatif. Dalam menerapkan studi dokumentasi penulis melakukan tahapan diantaranya membaca, beberapa tahapan antara lain memilih, mengidentifikasi dan menuliskan hal yang penting yang didapatkan.

Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah deskriptif. Penelitian dengan menggunakan analisis deskriptif bertujuan untuk menyusun sebuah deskripsi tentang beragam situasi dan kejadian (Suryabrata 1998, 19). Hal tersebut dikuatkan oleh (Sukmadinata 2005, 60) yang menjabarkan tujuan utama dari analisis kualitatif adalah untuk menggambarkan, menggali dan menjelaskan setiap kejadian, kegiatan-kegiatan sosial, sikap, kepercayaan, pemikiran seseorang maupun kelompok. Hal tersebut dijadikan sebagai dasar dalam melakukan analisis terhadap data pemikiran Ki Hadjar Dewantara dan relevansinya dengan upaya meruntuhkan budaya kuasa dan kekerasan pada anak.

Mengamalkan Pancadharm

Melalui pola pengasuhan yang memanusiakan anak dapat menjadi kritik tajam bagi model pengasuhan beraroma menindas, dengan budaya kekerasan yang melingkupinya. Penghargaan terhadap hak-hak anak dalam hidupnya adalah wujud nyata dari implementasi pendidikan *nir* kekerasan.

Pancadharmas seperti diuraikan dalam pemikiran Ki Hadjar Dewantara dapat dijadikan sebagai tuntunan dalam mewujudkan pola pengasuhan yang *nir* kekerasan pada anak. Melalui beberapa asas yang diajarkannya, mengisyaratkan pemaknaan yang mendalam tentang upaya memanusiaikan anak. Hal tersebut menjadi *counter discourse* bagi lestarnya budaya kuasa dan kekerasan pada anak. *Asas kemerdekaan*, relevansinya dengan upaya menciptakan pola pengasuhan anak yang bebas dari kekerasan adalah, merdeka dipahami sebagai kekuasaan dan keleluasaan anak memerintah dirinya sendiri. Artinya, tindakan represif yang bersifat mengekang kebebasan anak untuk berkembang sesuai dengan yang diinginkannya adalah tindakan mengubur hak anak hidup-hidup. Karena tujuan dari bersemainya asas ini adalah disiplin diri sendiri atas dasar nilai hidup yang tinggi, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Kekerasan yang terjadi dalam pendidikan baik fisik, psikis dan simbolik selalu sejalan dengan pengkebirian terhadap kemerdekaan anak. Oleh karenanya penting untuk menghargai kemanusiaan anak melalui kemerdekaan atas dirinya.

Asas kodrat alam berkaitan erat dengan fitrah manusia. Artinya, bahwa pada hakikatnya manusia itu sebagai makhluk. Sebagai makhluk, manusia harus mampu berkembang secara baik dari setiap dimensi kemanusiaannya. Dimensi hati, fikir dan perilaku harus sinergi tertanam dalam diri setiap anak. Proses pengkebirian terhadap berkembangnya tiga dimensi fitrah manusia tersebut, meniscayakan kelanggengan dari *violence culture*. Proses transmisi nilai-nilai melalui pengasuhan kepada anak harus berjalan manusiawi, melalui pola pengasuhan *Ahdhaf Al-Ruhiyyah*, *Ahdhaf Al-Jismiyyah* dan *Ahdhaf Al-Fikriyyah*. Sehingga melalui fasilitasi yang baik, setiap anak mampu berkembang menjadi manusia paripurna.

Hal diatas relevan dengan *Asas kemanusiaan* dalam pandangan Ki Hadjar Dewantara, bahwa darma setiap manusia itu adalah perwujudan kemanusiaan yang harus terlihat pada kesucian batin dan adanya rasa cinta kasih terhadap sesama manusia dan terhadap makhluk ciptaan Tuhan seluruhnya. Adanya kesucian batin dan rasa cinta tersebut menjadi *moral base* bagi manusia untuk menyayangi sesama dan selainya. Kekerasan yang menindas anak tentu mengambil *distingsi* dari konsepsi ideal tersebut. Rasa cinta dan kesucian batin keliru difahami melalui tindak tutur dan perilaku yang mengarah pada *term* kekerasan. Proses *ta'lim* harus dilengkapi dengan *ta'dib*, agar tidak berakhir hanya sebagai pengajaran, melainkan pendampingan yang intensif kepada anak, dengan wajah keramahan dalam pendidikan.

Selain itu, pola pengasuhan dan pendampingan pada anak harus mempertimbangkan *asas kebudayaan*. Kebudayaan harus berkembang ke arah kemajuan dan kepentingan hidup rakyat pada setiap zaman dan keadaan. Kemudian dalam praktiknya, anak tidak dicerabut dari akar kebudayaan dan kearifan lokal yang dimilikinya. Bahwa budaya selalu bersinergi dengan nilai-nilai yang diyakini dalam suatu masyarakat. Proses naturalisasi budaya harus

relevan dengan nilai-nilai lokal bangsa ini, bukan justru membanggakan budaya bangsa lain. Memberikan fasilitas bagi berkembangnya anak dari akar *cultural identity* nya adalah salah satu bentuk pengasuhan tanpa kekerasan.

Identitas kultural lekat dengan *Asas kebangsaan*, yang berarti tidak boleh bertentangan dengan kemanusiaan. Pola pengasuhan anak harus mampu memfasilitasi anak untuk merasa rasa satu dengan bangsanya sendiri, baik dalam suka dan duka, maupun dalam kehendak menuju kepada kebahagiaan hidup lahir dan batin seluruh bangsa. Hal tersebut muncul sebagai bentuk resistensi dari maraknya kekerasan simbolik yang mendikte anak untuk *ingkar* terhadap bangsanya. Karena kepentingan ideologis dari kelompok tertentu. Seperti pada kasus kekerasan pada buku materi ajar PAI dan Metode Membaca Praktis untuk anak-anak TK. Artinya, kekhawatiran tersebut beralasan mengingat domain kebangsaan justru terkikis oleh tidak objektifnya perangkat pengasuhan yang berjalan.

Pendidikan *nir* kekerasan

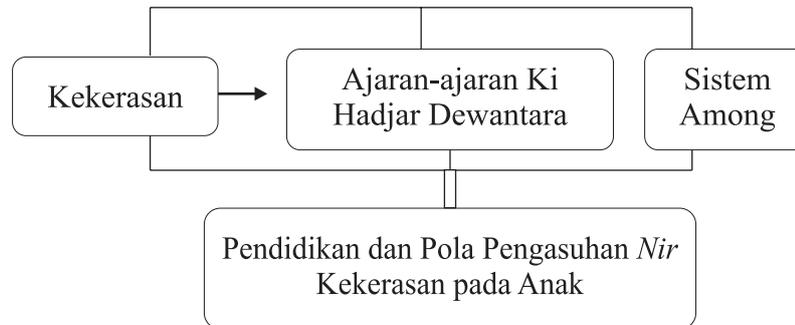
Agaknya relevan saat menarasikan tentang Pancadharmas Ki Hadjar Dewantara diatas dengan pemahaman pemikiran pendidikannya. Pendidikan didefinisikan sebagai daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti yang berhubungan dengan kekuatan batin dan karakter, serta pikiran, dan tubuh anak. Pola pengasuhan tanpa kekerasan memberikan proporsi yang ideal terhadap tiga dimensi kemanusiaan tersebut. Berkembang baiknya aspek kognitif, afektif dan psikomotorik anak mejadi indikator berlangsungnya proses pendidikan dan pendampingan yang berkualitas. Pendidikan yang berjalan tidak berhenti pada proses *transfer of knowledge*, tetapi lebih-lebih dalam hubungan diantara manusia dan "*modeling*" nya (*transfer of attitude and values*).

Sehingga dalam proses pengasuhan yang berjalan mengambil sekat sangat jauh dari kekerasan, karena pendidikan terjadi dalam suasana yang penuh cinta (*unconditional love*), hati yang penuh pengertian (*understanding heart*) serta relasi pribadi yang efektif (*personal relationship*) diantara pendidik maupun orang tua kepada anak. Selain itu, proses memanusiaikan anak harus beriringan dengan upaya menemukan "*self-hidden potential excellence*" (mutiara talenta yang tersembunyi di dalam diri) setiap anak. Sehingga anak tidak berkembang dengan paksaan, melainkan dari *passion* dan minatnya.

Ki Hadjar Dewantara begitu *concern* dalam ijtihad memerdekakan anak untuk berkembang baik dari dimensi hati, fikir dan perilakunya. Oleh karena itu, fasilitasi penting diberikan kepada anak, bukan dengan tindak kekerasan yang justru mematikan bakat dan kecenderungan setiap anak. Beragamam kecerdasan yang dimiliki oleh setiap anak, antara lain kecerdasan matematis/logis, kecerdasan verbal/bahasa, kecerdasan interpersonal, kecerdasan fisik/gerak/badan, kecerdasan musikal/ritme, kecerdasan visual/ruang/spasial,

dan kecerdasan intrapersonal harus difasilitasi oleh pendidik. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk keramahan simbolik terhadap anak. Bukan justru menggunakan paradigma “menjadikan” melainkan mendampingi anak untuk “menjadi”. Seperti pada gambar berikut:

Gambar. 1



Keterangan: Pendidikan Nir Kekerasan pada Anak

Seperti pada gambar di atas, kekerasan pada anak dapat dicegah dan ditindak menggunakan ajaran-ajaran dari Ki Hadjar Dewantara. Melalui pola diatas, tidak mustahil budaya kuasa dan kekerasan pada anak akan runtuh dan terkikis habis. Pola fasilitasi lahir dari pemikiran pendidikan tentang *among*. Sistem among yang diajarkan Ki Hadjar Dewantara melalui pendidikan yang berjiwa kekeluargaan, kodrat alam dan kemerdekaan tersebut harus terpatri didalam hati, nalar dan laku pendidik maupun orang tua. Kesadaran akan tanggung jawab sebagai *pamong* adalah untuk menghantarkan anak menjadi manusia ideal, bukan dengan tindakan represif maupun regresif.

Dengan dasar kekeluargaan, pendidik seharusnya mendidik dengan dasar kasih sayang kepada sesama manusia, saling menghormati dan menghargai perbedaan, tolong menolong, gotong royong, serta menjunjung persatuan. Selanjutnya, bersendikan kodrat alam dan kemerdekaan, artinya bahwa pendidik harus memberikan kebebasan bagi peserta didik sesuai kodratnya. *Among* artinya membimbing anak dengan penuh kecintaan dan mendahulukan kepentingan sang anak. Pendidik sebagai *pamong* tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada peserta didik. Peserta didik diberikan kebebasan dengan batasan tanggung jawab. Melalui sistem among peserta didik dapat berkembang menurut kodratnya sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial. Sehingga melalui beragam tahapan dan dinamika yang terjadi, akan melahirkan tatanan konsep yang kokoh tentang pola pengasuhan dan pendidikan *nir* kekerasan pada anak.

Melawan Budaya Kuasa dan Kekerasan

Selanjutnya, upaya teoretis yang dapat dilakukan untuk melawan budaya kasa dan keerasan pada anak adalah melalui Pemikiran pendidikan Ki Hadjar Dewantara yang terkandung didalam ajaran-ajaranya, seperti (1) tri sentra pendidikan, yaitu lingkungan

keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dalam hal ini, ketiga komponen penting tersebut harus mampu menjadi *agent* dalam memberikan pengasuhan dan pendidikan tanpa kekerasan. Karena mustahil budaya kekerasan akan terkikis jika hanya berjalan pada salah satu sentra nya saja. Konsepsi *learning society* yang diamanatkan pada tiga pilar pendidikan tersebut dapat berjalan dengan baik.

Kemudian (2) trilogi kepemimpinan, yaitu *ing ngarsasung tulodha*, *ing madya mangun karsa*, dan *tut wuri handayani*. Pendidik seharusnya tidak mengambil langkah brutal dalam mendidik, atas dasar peranannya sebagai pemimpin dalam belajar. Pendidik harus senantiasa menjadi *uswah* yang baik, motivator dan pendorong bagi anak dalam setiap fase perkembangan dirinya. Kesadaran tersebut penting merespon krisis keteladanan saat ini. Anak seharusnya mendapatkan asupan gizi tauladan dan motivasi yang melimpah, sehingga mampu berkembang setiap dimensi kemanusiaanya.

Pola pengasuhan yang diberikan juga harus berorientasi pada berkembangnya (3) *tri saksi jiwa*, yaitu *cipta*, *rasa*, dan *karsa*, dan (4) *tri nga*, yaitu *ngerti ngrasa nglakoni*. Daya *cipta* berkaitan erat dengan dimensi akal yang diimplementasikan dalam sikap *ngerti*. Daya *rasa* berkaitan dengan hati dan terrefleksikan dalam tindak *ngrasa*. Sedangkan daya *karsa* erat hubungannya dengan dimensi perilaku dan termanifestasikan dalam tindak *nglakoni*. Artinya, pola pengasuhan yang berjalan harus mampu mengakomodasi kebutuhan kemanusiaan setiap anak untuk berkembang. Pola demikian dapat meminimalisir budaya kekerasan pada anak, karena pendidik, orang tua dan masyarakat mampu memahami setiap dimensi kemanusiaan setiap anak.

Budaya kuasa dan kekerasan pada anak juga dapat dikikis dengan mengamalkan ajaran-ajaran Ki Hadjar sebagai suatu petuah. Ajaran-ajaran tersebut relevan dengan pola pengasuhan dan pendidikan yang ramah bagi anak. Ajaran yang berupa fatwa antara lain (1) *tetep antep mantep*, berarti seseorang yang memiliki ketetapan hati maka akan memiliki bobot dan tetap pada pilihannya. (2) *ngandel kandel kendel bandel*, berarti bahwa seseorang harus percaya kepada Tuhan dengan kepercayaan yang utuh sehingga ia berani menghadapi sesuatu karena tahu kebenarannya, serta tidak mudah putus asa.. dan (3) *ning neng nung nang*, *ning* dari kata hening (tenang), *neng* dari kata meneng (diam, tidak emosi, dan tidak gegabah), *nung* dari kata hanung (teguh dan kuat), serta *nang* dari kata menang (wewenang) yang berarti dengan pikiran yang tenang, tidak emosi, memiliki keteguhan hati maka akan memperoleh kemenangan.

Melalui pola pengasuhan yang memanusiakan anak seperti diuraikan diatas menjadi kritik tajam bagi model pengasuhan beraroma *feodal*, dengan budaya kekerasan sebagai tamengnya. Pengahrgaan terhadap hak-hak anak dalam hidupnya adalah wujud nyata dari implementasi pendidikan *nir* kekerasan. Pendidikan dan pola pengasuhan ramah anak

tidak terhenti pada upaya memberantas aktivitas fisik yang melukai, melainkan juga psikis dan simbolik. Sehingga upaya komprehensif tersebut dapat berjalan dari ketiga dimensi kehidupan manusia.

Kesimpulan

Pendidikan seharusnya mampu menghargai setiap potensi yang dimiliki peserta didiknya, tanpa ada pengekangan. Karena peserta didik hakikatnya adalah manusia merdeka yang mampu berkembang dengan baik dengan peran pendidikan yang baik pula. Manusia merdeka berarti seseorang yang mampu berkembang secara utuh dan selaras dari segala aspek kemanusiaannya dan yang mampu menghargai dan menghormati kemanusiaan setiap orang. Seperti ujaran Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan seharusnya “*educate the head, the heart, and the hand*”.

Meskipun pendidikan menjadi arena tindak kekerasan, namun pendidikan masih sangat relevan untuk menjadi *problem solver* dari masalah tersebut. Pendidikan dapat menjadi sarana untuk menanamkan nilai-nilai moral ketimuran dan hakikat kebhinekaan, sebagaimana hakikat pendidikan ialah untuk membentuk manusia seutuhnya. Lewat pendidikan kedamaian bisa diretas, lewat pendidikan ketentraman bisa tercipta, tentunya hal tersebut dicapai dengan pendidikan yang memanusiakan manusia.

Melalui pemahaman yang memadai dan tekad untuk mengamalkan nilai-nilai dan ajaran Ki Hadjar Dewantara dapat memutus mata rantai praktik budaya kekerasan pada anak. Kekerasan fisik, psikis dan simbolik dapat ditepis dengan konsep pendidikan ramah anak dan *nir* kekerasan. Karena anak adalah penerus perjuangan bangsa, oleh sebab itu tidak relevan jika masih melakukan labelisasi budaya kekerasan atas nama pendidikan.

Referensi

- Aunullah, Indi (2006). “Bahasa dan Kuasa Simbolik dalam Pandangan Pierre Bourdieu”. (Skripsi S1). Yogyakarta: Fakultas Filsafat Universitas Gajah Mada
- Hakim, Andi (2016). “Fight Against Legitimate Language Violence to Childern; The Study of Critical Discourse Analysis in the Book of Anak Islam Suka Membaca” *Prosiding KOLITA 14 UKI Atmajaya*
- Hakim, Andi (2016). “The Analysis of Symbolic Violence in Education; The Study of Critical Discourse Analysis in the Book of PAI dan Budi Pekerti” *Prosiding ICLCS LIPI*
- Rahayu, Ayu (2015). “Penerapan Konsep Pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam Pembelajaran untuk Membentuk Peserta Didik Berkarakter Cerdas dan Berintegritas”. *Jurnal Edukasi Volume XI Nomor 1 September 2015*
- Supraptio (2013). “Membongkar Kekerasan Simbolik dalam Pendidikan”. *Jurnal Edukasi Volume X September 2013*